

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN (P3) TERHADAP STATUS
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PADA UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA PRESPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

DISUSUN OLEH :

Sandri Abdul Aziz

NIM. 1711150049

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Sketsa oleh: **Sandri Abdul Aziz Nim 171150049 Dengan Judul "Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada Undang-Undang Cipta Kerja Prespektif Siyasah Dunsuriyah, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah di uji dan dipertimbangkan di depan Tim sidang munaqasyah Fakultas Syariah universitas islam negeri fatmawati sukarno Bengkulu pada**

Hari: **Jumat**

Tanggal: **16 Juni 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **2023M**

Dzulfahid **1444 H**

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjidi, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Rohmadi, MA

NIP. 19710320996031001

Penguji I

Dr. Iry Fahimah, Lc, MA

NIP. 197307122006042001

Sekretaris

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 199303312019031005

Penguji II

Edi Mulyono, M.E.Sv

NIP. 198905122020121007

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Sandri Abdul Aziz Nim 1711150049** Dengan Judul **"Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada Undang-Undang Cipta Kerja Prespektif Siyasah dusteriyah. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.**

Bengkulu, 30 Mei 2023

Jumadil Awal 1444

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohmadi, MA
NIP. 19710320996031001

Hanayah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

PERSEMBAHAN

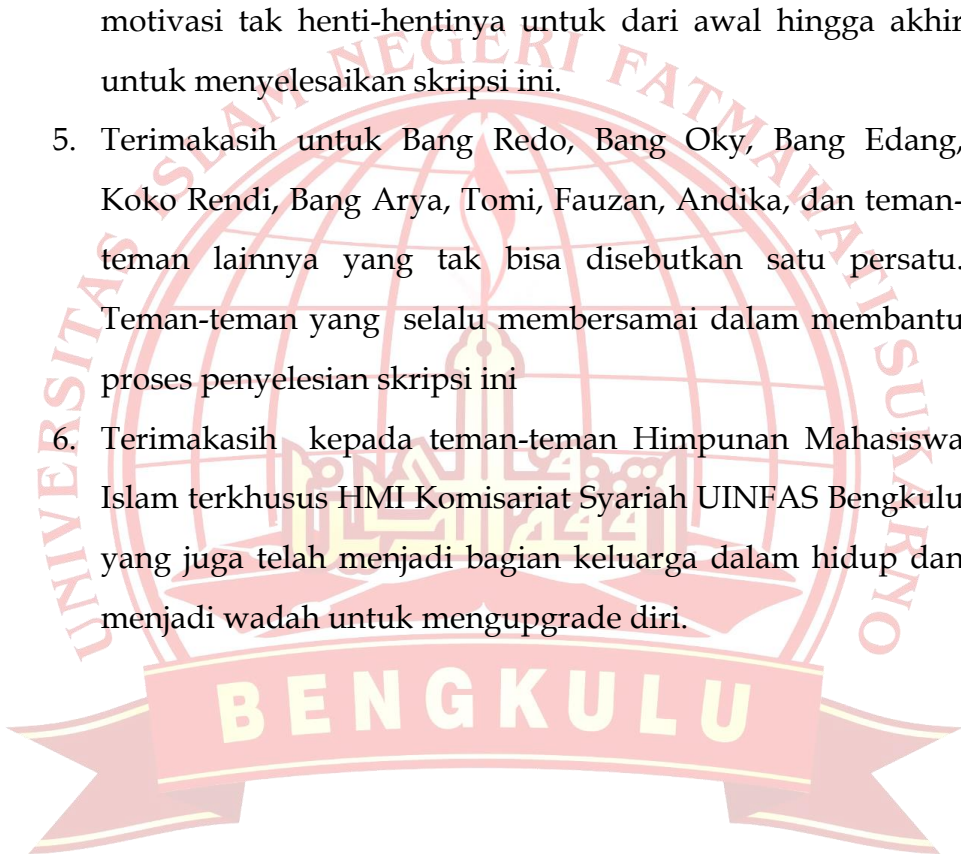
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana maha pengasih dan penyayang, yang telah memberikan akal Budi untuk berpikir sholat dan salam kepada Suri Tuladan Nabi Muhammad SAW.

Terimakasih yang tak terhingga ku Ucapkan kepada-mu yang telah menghadirkan mereka yang senantiasa selalu memberikan Doa, Motivasi dan Semangat, Baik Materi dan Non Materi dalam proses pembuatan Skripsi ini.

Dengan Mengharapkan Ridho-mu. Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

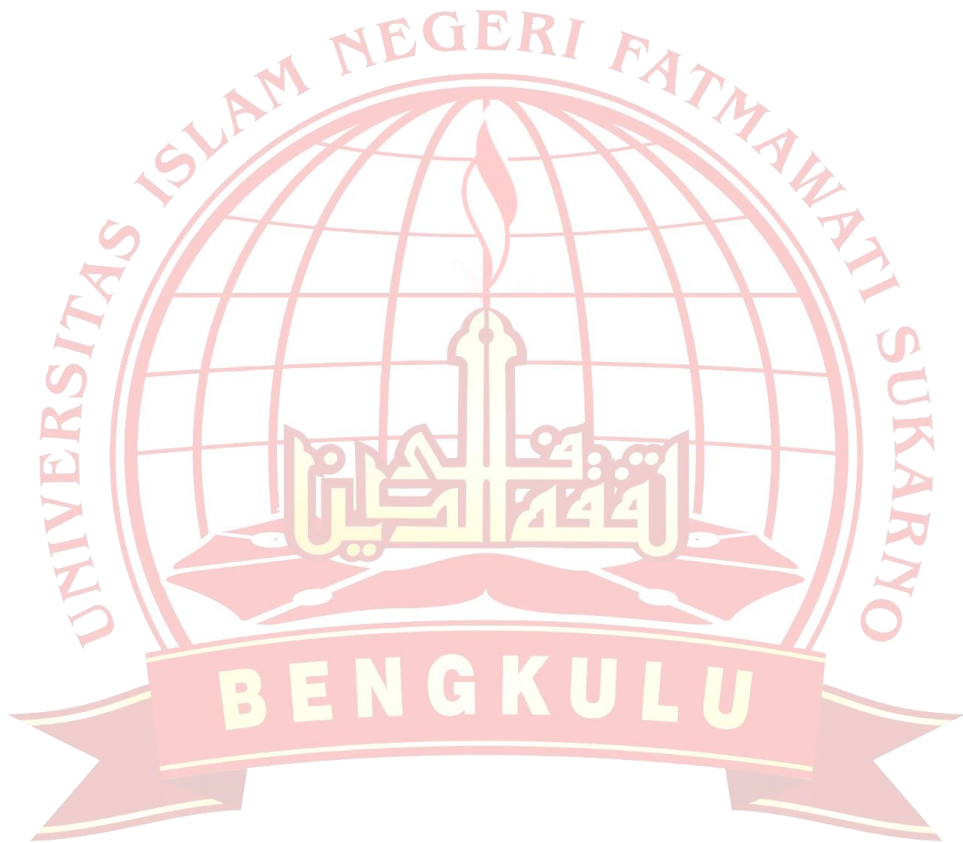
1. Terimakasih Kedua orang tuaku Bapak Drs. Sehmi, M.Pd dan Ibu Rosdiana, S.Pd yang telah membesarkanku dan mendidik dengan kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini, serta doa dan dukungannya selama ini untuk bisa dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Terimakasih kepada Adikku Sindra Abdul Yasier, Nadsir Abdul Jabar dan Risdan Abdul Razzaq yang selalu memberikan dukungan, semangat dan penyemangar hingga bisa sampai di titik ini semoga kalian bangga dengan apa sekarang saya peroleh

3. Terimakasih kepada keluarga besarku dari Bapak dan Ibu yang telah ikut memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam hidupku.
4. Terimakasih buat perempuan cantik dan baik hati dengan Nim: 2011280026 yang telah memberikan semangat dan motivasi tak henti-hentinya untuk dari awal hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih untuk Bang Redo, Bang Oky, Bang Edang, Koko Rendi, Bang Arya, Tomi, Fauzan, Andika, dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman yang selalu kebersamai dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini
6. Terimakasih kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam terkhusus HMI Komisariat Syariah UINFAS Bengkulu yang juga telah menjadi bagian keluarga dalam hidup dan menjadi wadah untuk mengupgrade diri.



MOTTO

“BERSYUKUR DAN IKHLAS, YAKIN USAHA SAMPAI”



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "implikasi hukum terhadap perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan (p3) terhadap status inkonstitusional bersyarat pada undang-undang cipta kerja prespektif siyasah dusturiyah. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di jurnal ilmiah Fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.

5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu 2023M

Dzulq'adah 1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Sandri Abdul Aziz

NIM. 1711150049

ABSTRAK

Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada Undang-Undang Cipta Kerja Prespektif *Siyasah Dusturiyah*

Oleh: Sandri Abdul Aziz Nim: 1711150049

Penelitian penulis di skripsi ini bahwasannya mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah adalah 1. Status kejelasan yuridis pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2022 2. Prespektif *Siyasah dusturiyah* Terhadap Inkonstitusional bersyarat pada Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui Kejelasan yuridis dari perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Untuk mengetahui analisis *Siyasah dusturiyah* terhadap status Inkonstitusional bersyarat Pada Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penulisan penelitian skripsi ini yaitu 1. Status kejelasan yuridis pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasca disahkannya UU Nomor. 13 Tahun 2022 dalam hasil penelitian bahwa DPR melakukan Revisi mengenai Undang-Undang PPP (P3) Sehingga mengakomodir dari kekurangan secara formil pasca ditetapkan secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dalam hal ini juga secara materiil dalam Undang-Undang tersebut tidak terjadi perbaikan hingga saat ini melainkan Presiden telah mengeluarkan Perppu Untuk mempercepat berlakunya Undang-Undang Cipta kerja. 2. Prespektif *Siyasah dusturiyah* Terhadap Inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja dalam hasil penelitian ini dalam konsep Masalah Mursalah bisa dilihat dari beberapa pasal yang kontroversi tersebut lebih banyak mengandung kemudharatan dibandingkan mengandung manfaat, hal tersebut seharusnya tidak

terjadi karena DPR selaku *ahlul halli wal aqdi* (perwakilan rakyat) seharusnya telah mampu untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada rakyat. Selaku perwakilan rakyat pula seharusnya DPR RI telah mengetahui dimana persoalan-persoalan yang menjadi kegelisahan sehingga membuat rakyat merasa dirugikan.

Kata Kunci: Implikasi, PPP, Inkonstitusional



ABSTRACT

Legal Implications of Amending the Law on the Formation of Legislation (P3) for Conditional Unconstitutional Status in the Job Creation Law from the Perspective of Siyasa Dusturiyah

By: Sandri Abdul Aziz Nim: 1711150049

The author's research in this thesis actually refers to Law No. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation (P3) and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The formulation of the problem is 1. Status of juridical clarity in the Job Creation Law after Law No. 13 of 2022 2. Siyasa dusturiyah's perspective on unconstitutionality is conditional on the Job Creation Law. The objectives of this research are 1. To find out the juridical clarity of changes to the Law on Formation of Legislation against conditional unconstitutional in the Job Creation Law. 2. To find out Siyasa dusturiyah's analysis of conditional unconstitutional status in the Job Creation Law. This thesis writing method uses library research which is descriptive-analytical in nature, using a normative approach. The results of writing this thesis research are 1. The status of juridical clarity in the Job Creation Law after Law No. 13 of 2022 in the results of the study that the DPR made revisions to the PPP Law (P3) so that it accommodates formal deficiencies after being conditionally determined by the Constitutional Court. However, in this case also materially in the Law there has been no improvement to date, instead the President has issued a Perppu to accelerate the entry into force of the Job Creation Law. 2. The Siyasa dusturiyah perspective on conditional unconstitutional on the Job Creation Law in the results of this research in the concept of Maslahah Mursalah can be seen from several contradictory articles that contain more harm than benefits, this should not happen because the DPR as *ahlul halli wal aqdi* (representative people) should have been able to help solve the problems that exist in the people. As the representatives of the people, the DPR RI should have known where the issues that were causing anxiety made the people feel disadvantaged.

Keywords: Implications, PPP, Unconstitutional

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, serta rahmat shalawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul: **“Implikasi Hukum Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada UU Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah.”**.

Penulisan proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memenuhi penulisan skripsi Program Strata-1 pada Fakultas Syariah Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

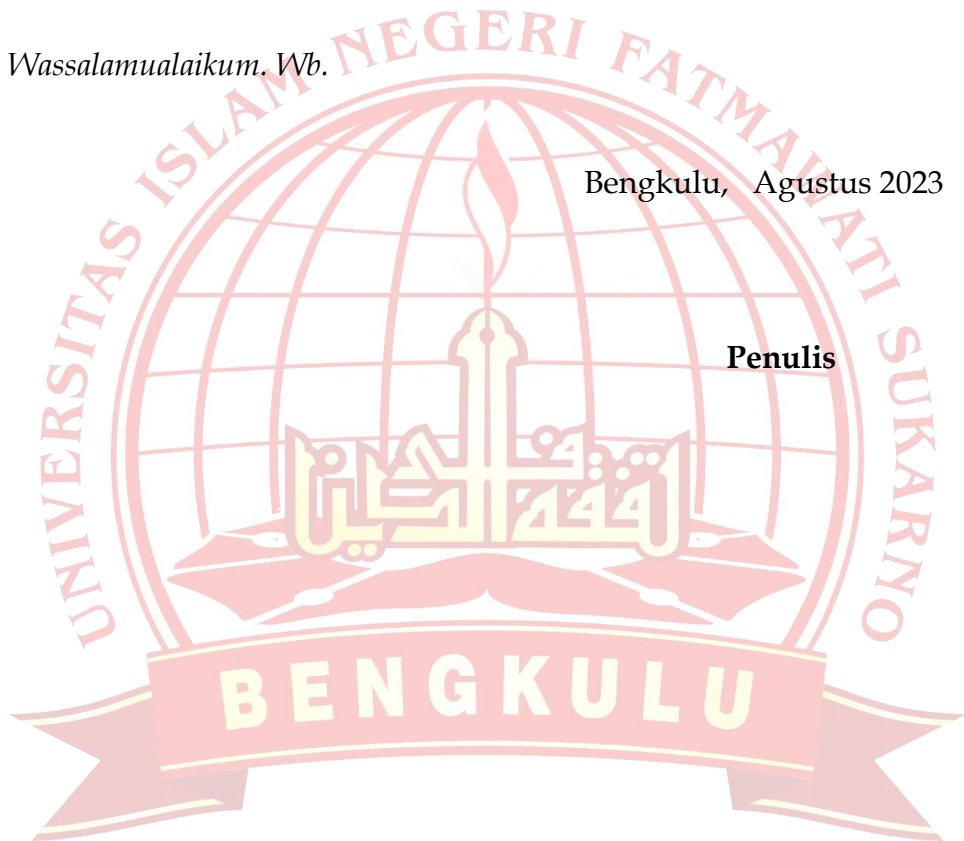
Penulis sangat menyadari di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik membangun untuk menyempurnakan proposal skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini. Akhir kata, semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum. Wb.

Bengkulu, Agustus 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PERSEMBAHANiii

MOTTOv

PERNYATAAN KEASLIAN vi

ABSTRAKviii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISIxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Kegunaan Penelitian..... 12

E. Penelitian Terdahulu 13

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Penulisan..... 23

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Implikasi Hukum 25

B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	27
C. Teori Inkonstitusional Bersyarat	43
D. Teori Siyasah dusturiyah.....	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Kejelasan Yuridis Pada UU Cipta Kerja Pasca Disahkannya UU Nomor. 13 Tahun 2022	56
B. Prespektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Inkonstitusional Bersyarat Pada UU Cipta Kerja.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

